

**IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DI INDONESIA:
SUATU STUDI DENGAN PENDEKATAN EMPIRIS**

Gibran Ferdy Ramadhan
gibranferdy17@gmail.com
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingginya tingkat korupsi di Indonesia melalui pendekatan empiris. Korupsi dipandang sebagai permasalahan struktural yang dipengaruhi oleh aspek sosial, politik, ekonomi, serta budaya birokrasi. Dengan menggunakan data sekunder dari berbagai laporan lembaga pemerintah, survei nasional, serta kajian literatur yang relevan, penelitian ini menganalisis korelasi antara kondisi sosial-ekonomi, kualitas tata kelola pemerintahan, tingkat transparansi, dan efektivitas lembaga penegak hukum terhadap prevalensi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, rendahnya akuntabilitas birokrasi, ketimpangan ekonomi, serta budaya permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan merupakan faktor dominan yang mendorong praktik korupsi. Pendekatan empiris yang digunakan memberikan gambaran yang lebih objektif dan terukur mengenai pola-pola penyebab korupsi, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan antikorupsi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pengawasan, peningkatan transparansi publik, serta penguatan integritas aparatur negara sebagai upaya strategis dalam menekan angka korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Faktor Penyebab, Indonesia, Pendekatan Empiris, Tata Kelola Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas.

Abstract

This study aims to identify factors influencing the high level of corruption in Indonesia through an empirical approach. Corruption is viewed as a structural problem influenced by social, political, economic, and bureaucratic culture. Using secondary data from various government agency reports, national surveys, and relevant literature reviews, this study analyzes the correlation between socioeconomic conditions, the quality of governance, the level of transparency, and the effectiveness of law enforcement agencies on the prevalence of corruption. The results indicate that weak internal oversight, low bureaucratic accountability, economic inequality, and a permissive culture toward abuse of authority are the dominant factors driving corrupt practices. The empirical approach used provides a more objective and measurable picture of the patterns that cause corruption, which is expected to form the basis for formulating more targeted anti-corruption policies. This study emphasizes the importance of reforming the oversight system, increasing public transparency, and strengthening the integrity of state officials as strategic efforts to reduce corruption in Indonesia.

Keywords: Corruption, Causal Factors, Indonesia, Empirical Approach, Governance, Transparency, Accountability.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang menghambat pembangunan nasional dan merusak tatanan sosial, ekonomi, serta politik di Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan struktur pemerintahan yang kompleks, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengendalikan praktik korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berbagai indeks internasional, seperti Corruption Perceptions Index (CPI), secara konsisten menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan

strategi pemberantasan korupsi, seperti penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan keterbukaan informasi publik, serta digitalisasi layanan pemerintahan, namun praktik korupsi tetap berlangsung dan menunjukkan pola yang semakin beragam.

Tindak pidana korupsi di Indonesia bukan sekadar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), melainkan juga fenomena sosial yang mencerminkan krisis moral, lemahnya institusi hukum, serta kegagalan pendidikan karakter dalam jangka panjang. Korupsi tidak hanya merampas keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan demokrasi, memperlemah kepercayaan publik terhadap negara, serta menciptakan ketimpangan sosial yang semakin dalam. Meski Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional dan membentuk lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), angka korupsi tetap tinggi. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih stagnan di angka 34 dari 100, menempatkan Indonesia dalam posisi ke-110 dari 180 negara pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap korupsi masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar masalahnya secara struktural dan kultural (Transparency International, 2023).

Salah satu kunci penting dalam memahami korupsi adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya secara objektif dan terukur. Kajian empiris berperan penting dalam memberikan gambaran berdasarkan data nyata yang dapat menunjukkan hubungan antara karakteristik sosial, ekonomi, politik, serta kelembagaan terhadap tingkat korupsi. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini berupaya untuk mengungkap faktor-faktor dominan yang memengaruhi maraknya praktik korupsi di Indonesia, sehingga rekomendasi kebijakan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi faktual.

Pendekatan empiris memungkinkan penelitian ini untuk menyajikan analisis berbasis bukti terhadap faktor penyebab korupsi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif. Dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan lembaga pemerintah, publikasi akademik, survei lembaga antikorupsi, dan berbagai dataset terkait tata kelola pemerintahan, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Analisis ini tidak hanya menyoroti aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memerhatikan variabel institusional seperti efektivitas penegakan hukum, transparansi publik, dan kualitas regulasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai akar permasalahan korupsi serta memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pencegahannya.

tindakan korupsi dapat dijelaskan melalui pendekatan kriminologi, salah satunya adalah teori GONE (Greed, Opportunity, Need, Exposure), yang menegaskan bahwa kejahatan terjadi ketika seseorang memiliki kebutuhan dan peluang, serta berada dalam lingkungan yang tidak memiliki sistem pengawasan efektif¹. Dalam konteks Indonesia, korupsi seringkali terjadi bukan hanya karena kesempatan yang tersedia, tetapi juga karena adanya legitimasi sosial yang membolehkan penyimpangan dalam praktik birokrasi. Budaya permisif ini diperparah oleh absennya keteladanan dari pemimpin dan lemahnya sistem reward and punishment dalam institusi pemerintahan².

penting untuk melihat pendidikan sebagai salah satu instrumen preventif dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan tentang hukum, melainkan membentuk karakter generasi muda agar menjunjung

¹ Patricia, E., Hartono, B., & Hasan, Z. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 13(1), 32-39.

² Sukiyat, H. (2020). *Teori dan praktik pendidikan anti korupsi*. Jakad Media Publishing.

tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam studi yang dilakukan oleh Zainudin Hasan dan rekan-rekannya, ditegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum harus ditopang oleh keteladanan sosial, peran aktif masyarakat, dan ketegasan hukum sebagai pilar utama pembentuk budaya integritas³. Pendidikan sebagai strategi jangka panjang sangat relevan karena mampu menciptakan generasi yang tidak hanya mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk tidak melakukannya dalam praktik kehidupan nyata.

RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi di Indonesia berdasarkan pendekatan empiris?
2. Kebijakan apa yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis empiris untuk mengurangi praktik korupsi di Indonesia?.

PEMBAHASAN

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka korupsi di Indonesia adalah lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Kurangnya pengawasan yang ketat dalam manajemen keuangan negara memberikan peluang besar bagi praktik korupsi untuk berkembang⁴. Tanpa pengawasan yang baik, banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk menyalahgunakan dana publik. Lemahnya pengawasan ini sering kali terjadi karena kurangnya sumber dayam manusia yang kompeten serta sistem audit yang tidak berjalan dengan efektif.

Selain itu, rendahnya tingkat transparansi dalam pemerintahan juga menjadi faktor signifikan yang mendorong terjadinya korupsi⁵. Sistem pemerintahan yang tidak transparan memberikan ruang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang mereka⁶. Dalam banyak kasus, akses masyarakat terhadap informasi mengenai anggaran dan kebijakan pemerintah sangat terbatas, sehingga memungkinkan praktik korupsi berkembang tanpa adanya pengawasan dari masyarakat sipil. Transparansi yang rendah ini diperburuk oleh birokrasi yang berbelit-belit serta minimnya keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

Kurangnya integritas individu juga turut menjadi penyebab utama korupsi di Indonesia. Rendahnya nilai moral dan etika di kalangan pejabat publik dan pegawai swasta sering kali menjadi pemicu tindakan korupsi⁷. Banyak individu yang tergoda untuk melakukan tindakan tidak jujur karena adanya kesempatan dan minimnya risiko sanksi yang berat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai, yang dalam beberapa kasus membuat mereka mencari cara lain untuk memperoleh keuntungan finansial. Ketika kesejahteraan pegawai rendah dan mereka dihadapkan pada peluang untuk melakukan korupsi tanpa pengawasan ketat, maka tindakan tersebut cenderung meningkat⁸.

Faktor lainnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia masih tergolong ringan dibandingkan dengan negara lain yang memiliki kebijakan antikorupsi yang ketat⁹. Banyak kasus korupsi yang berakhir dengan hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara. Hal ini membuat para pelaku tidak merasa jera dan justru semakin berani melakukan tindakan korupsi. Reformasi dalam sistem hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan korupsi dihukum dengan tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.

³ Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. *Universitas Bandar Lampung (UBL) Press*.

Untuk mengatasi masalah korupsi yang semakin kompleks, diperlukan berbagai strategi pemberantasan yang efektif. Salah satu strategi utama adalah penguatan sistem pengawasan melalui audit berkala dan transparansi yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintahan¹⁰. Pengawasan internal yang ketat dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara sebelum masalah semakin besar. Selain itu, penerapan sistem e-Government yang efektif juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan meminimalisir celah bagi praktik korupsi¹¹. Digitalisasi proses administrasi pemerintahan memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran publik secara lebih terbuka¹².

Penting untuk melihat pendidikan sebagai salah satu instrumen preventif dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan tentang hukum, melainkan membentuk karakter generasi muda agar menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam studi yang dilakukan oleh Zainudin Hasan dan rekan-rekannya, ditegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum harus ditopang oleh keteladanan sosial, peran aktif masyarakat, dan ketegasan hukum sebagai pilar utama pembentuk budaya integritas. Pendidikan sebagai strategi jangka panjang sangat relevan karena mampu menciptakan generasi yang tidak hanya mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk tidak melakukannya dalam praktik kehidupan nyata.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi pejabat publik serta masyarakat sangat penting untuk membangun budaya integritas dalam sektor publik dan swasta. Pelatihan tentang etika dan moralitas bagi pejabat pemerintah dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya¹³. Pendidikan antikorupsi sejak dini juga diperlukan untuk membentuk generasi mendatang yang memiliki kesadaran tinggi akan bahaya korupsi¹⁴.

Aspek moral dan etika individu juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya angka korupsi¹⁵. Banyak pejabat publik dan pegawai pemerintahan yang memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang mereka karena tidak adanya pengawasan yang ketat. Rendahnya kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas publik menyebabkan banyak individu tergoda untuk melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi atau kelompok.

KE S I M P U L A N

Berdasarkan hasil kajian dan analisis empiris yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan institusional secara simultan. Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya akuntabilitas birokrasi, ketimpangan sosial-ekonomi, serta budaya permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya korupsi. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan yang belum optimal, kurangnya transparansi publik, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum turut memperburuk kondisi dan membuka peluang bagi praktik korupsi untuk terus berlangsung.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini memberikan gambaran objektif berdasarkan data dan temuan faktual, sehingga memperkuat pemahaman mengenai faktor penyebab korupsi secara lebih terukur. Analisis berbasis bukti ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan melalui pendekatan tunggal atau parsial, melainkan harus melibatkan perbaikan struktural yang meliputi reformasi birokrasi, peningkatan integritas aparatur negara, penguatan lembaga penegak hukum, serta perluasan sistem transparansi dan digitalisasi layanan publik.

Penelitian ini juga menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan pola pendidikan antikorupsi sejak dini, peningkatan literasi kewarganegaraan, dan pembangunan budaya integritas menjadi fondasi penting dalam menekan tingkat korupsi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan antikorupsi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan korupsi yang terus berkembang di Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif dan berbasis empiris, diharapkan praktek korupsi dapat ditekan secara signifikan sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aziz, A. H., Hasan, Z., Fauzi, I. R. H., & Mansah, M. (2025). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana untuk Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 25-34.
- Aziza, S. N. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46-54.
- BANDAR LAMPUNG. Kontribusi: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian
Patricia, E., Hartono, B., & Hasan, Z. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Tidak
Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z., Aji, M. R. F., Arsyad, Y. S., Syafei, N., Hasbana, M. I., Zamera, Z., ... & Heryulizar, M. H. (2025). PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
- Irawan, B., & Haryanto, A. (2020). Korupsi dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(3), 213–228.
- Juwita Della. (2025). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi. *Sankasara Pendidika dan Pengajaran*, vol. 3, No. (1), 52-58
- Masyarakat, 1(1), 113-127.
- Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 13(1), 32-39.
- Rohman, A. (2020). Reformasi Birokrasi untuk Mencegah Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 121–135.
- Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137-156.
- Samosir, M. A. (2024). Manajemen dan Kontribusi Intelektual Kristiani di Indonesia dalam Memberantas Korupsi. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Santoso, I. A. P. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10-10.
- Setiawan, I. (2024). Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek. CV. Rtujuh Media Printing.
- Sukiyat, H. (2020). Teori dan praktik pendidikan anti korupsi. Jakad Media Publishing.
- Sukmadani, H., & Ibrahim, F. (2021). Analisis Faktor Penyebab Korupsi di Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 45–58.
- Sukmadani, H., & Ibrahim, F. (2021). Analisis Faktor Penyebab Korupsi di Sektor Publik d Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 45–58.